II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Berdasarkan batasan koperasi ini, koperasi mengandung 5 unsur sebagai berikut:

a. Koperasi adalah Badan Usaha

   Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

b. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi

   Ini berarti bahwa, koperasi bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa

anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

c. Koperasi adalah koperasi yang bekerja berdasarkan "prinsip-prinsip koperasi"

   Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, ada 7 prinsip. Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.

d. Koperasi adalah "Gerakan Ekonomi Rakyat"

   Ini berarti bahwa, koperasi merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

e. Koperasi "berazaskan kekeluargaan"

   Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi (Sitio, 2001).

Menurut Suwandi (1985), koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Secara umum, setiap kegiatan usaha ekonomi, baik koperasi atau organisasi ekonomi lainnya (PT, Firma, CV dan sebagainya), memiliki misi untuk melayani masyarakat (konsumen) dan berupaya mencapai kemakmuran. Namun dalam berbagai hal terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaannya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan koperasi dan organisasi ekonomi lainnya.

No.	Perbedaan	Koperasi	Organisasi ekonomi lainnya
1.	Segi organisasi	Sifat keanggotaannya sukarela yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan hak dalam rapat satu orang satu suara tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota.	Keangotaan terbatas hanya pada kriteria menurut pemilik modal. Seorang pemilik modal memiliki lebih dari satu suara. Jumlah suara ditetapkan menurut jumlah saham yang dimilikinya. Kekuasaan tertinggi pada pemilik modal.
2.	Segi tujuan organisasi	Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.	Bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
3.	Segi pengelolaan organisasi	Pengelolaan organisasi pada dasarnya dilakukan oleh anggota secara terbuka.	Pengelolaan dilakukan secara tertutup.
4.	Segi sikap terhadap pasar	Dalam menghadapi pasar, koperasi selalu mengadakan koordinasi dan integrasi untuk melakukan kerja sama baik vertikal maupun horizontal.	Pada organisasi ekonomi lainnya dalam menghadapi pasar adalah saling bersaing satu sama lainnya.

Sumber: Ima Suwandi, 1985

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Selanjutnya, fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Mempunyai peran serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
d. Mewujudkan dan mengembangkan perekononian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 5 adalah sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
d. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
e. Kemandirian
f. Pendidikan perkoperasian
g. Kerja sama antar koperasi.

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efesiensi dalam ekonomi. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu:

1) Koperasi Konsumsi

   Barang konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang-barang pangan, barang-barang sandang dan barang pembantu keperluan sehari-hari. Oleh sebab itu, maka koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut Koperasi Konsumsi.

2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

   Koperasi Kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut Koperasi Kredit. Akan tetapi utuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu

dibantu. Oleh karena itu, maka Koperasi Kredit lebih tepat disebut Koperasi Simpan Pinjam.

3) Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah Koperasi Peternak Sapi Perah, Koperasi Batik, Koperasi Pertanian, dan lain-lain.

4) Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya Koperasi Angkutan, Koperasi Jasa Audit, dan lain-lain.

5) Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD).

2. Koperasi Unit Desa (KUD)

Pada masa pembangunan orde baru, KUD lahir sebagai koperasi yang berorientasi pedesaan. Inpres No. 4 Tahun 1973 tanggal 5 Mei 1973 menjadi tonggak yuridis keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD). KUD berperan penting dalam berbagai kegiatan perekonomian di pedesaan misalnya dalam pengadaan pangan, penyaluran bahan kebutuhan masyarakat pedesaan, serta penyaluran kredit (Kusumah, 1986).

Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai alat pendukung pembangunan saat ini terdapat perbedaan pandangan dalam menafsirkannya. Dasar perbedaannya bertitik tolak pada apa sebenarnya yang menjadi tujuan pokok dikembangkannya KUD di Indonesia, untuk itu Ima Suwandi (1984) melakukan pengamatan yaitu, pertama mengamati kelompok klasik yang beranggapan bahwa perkembangan KUD sebagai alat pendukung pembangunan adalah alat masyarakat yang ikut serta secara aktif pada setiap gerak dan langkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Kedua adalah kelompok pembaharuan yang beranggapan bahwa koperasi termasuk KUD sebagai alat pendukung pembangunan dapat pula menjadi alat untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KUD adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang diselenggarakan oleh dan untuk mereka (anggota) dan merupakan tumpuan harapan dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Konsep dasar KUD sebagai bentuk koperasi pedesaan serba usaha dilandasi oleh pemikiran yang mendasar. Pertama, dengan bentuk koperasi tersebut, KUD berpeluang untuk mempunyai skala usaha yang lebih besar, layak, dan efisien daripada badan usaha lainnya yang ada di pedesaan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang efisien dan efektif guna memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Kedua, KUD sebagai koperasi serba usaha

akan lebih berpeluang untuk melayani berbagai kebutuhan dan kegiatan usaha seluruh anggotanya. Kegiatan usaha anggota yang dinilai masih lemah dan belum layak akan dapat dilayani oleh KUD dengan subsidi silang dari hasil kegiatan usaha anggota yang sudah kuat dan layak. Kondisi ini akan mengurangi kemungkinan terjadi kesenjangan sosial dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan di pedesaan. Ketiga, KUD akan memiliki tingkat keterbukaan lebih besar untuk menampung seluruh warga desa untuk menjadi anggota tanpa membedakan profesi calon anggota tersebut. Hal ini selaras dengan prinsip dasar koperasi, di mana keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Konsep dasar inilah yang diharapkan dapat mewujudkan dan melestarikan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan di pedesaan.

Pada perkembangan selanjutnya, Inpres No. 4 Tahun 1984 mempertegas peran KUD sebagai pusat pengembangan wilayah perekonomian pedesaan. KUD diharapkan menjadi bagian integral dari pembangunan pedesaan (Kusumah, 1986). Usaha pembinaan dan pengembangan KUD diarahkan agar KUD mampu memegang peran utama dalam kegiatan perekonomian pedesaan, khususnya sektor-sektor:

a. Pertanian, meliputi pertanian pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, serta agroindustri,
b. Penyaluran kebutuhan pokok masyarakat pedesaan terutama pangan, sandang dan papan,

c. Bidang jasa yang meliputi simpan pinjam dan perkreditan,

d. Industri kecil dan kerajinan rakyat, serta

e. Bidang lain sesuai potensi wilayah setempat.

Menurut Kusumah (1986), koperasi dapat memberikan tiga manfaat utama bagi anggota, yaitu berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat teknologi. Ketiga macam manfaat ini diberikan dalam bentuk pelayanan dari unit-unit usaha yang diselenggarakan koperasi para anggota.

Manfaat ekonomi akan dirasakan bila anggota mengalami perbaikan kondisi ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pendapatan anggota. Pelayanan yang memberikan manfaat ekonomi dapat berupa pemenuhan kebutuhan anggota melalui pembelian sarana produksi yang lebih murah, kepastian pemasaran produk dan memperoleh kepuasan harga jual dan harga beli produk serta pinjaman untuk pengembangan usaha.

Manfaat sosial akan dirasakan anggota jika terjadi kerja sama antar anggota dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha, serta terbuka peluang dan kesempatan kerja bagi anggota dan masyarakat dalam koperasi. Selain itu manfaat sosial juga dapat dirasakan melalui bantuan-bantuan atau sumbangan sosial yang diberikan koperasi kepada para anggota dan masyarakat di sekitarnya

Manfaat teknologi dapat dirasakan anggota dengan adanya pengenalan teknologi baru. Penyuluhan dan kursus keterampilan dapat membantu

penyerapan teknologi yang diharapkan dapat menunjang kegiatan produksi dan pemasaran (Kusumah, 1986).

3. Peranan KUD

Peranan menurut Linton dalam Mardikanto (1991) mencakup seluruh pola kebudayaan yang dihubungkan dengan kedudukan tertentu, mencakup sikap, nilai dan perilaku yang ditentukan oleh masyarakat terhadap anggotanya yang berada pada posisi tertentu.

Menurut Anoraga dan Ninik (1993), peranan koperasi dalam meningkatkan produksi adalah mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran secara merata. Kehadiran koperasi di tengah masyarakat merupakan malaikat penyelamat, karena koperasi merupakan wadah yang cocok bagi mereka yang ekonominya lemah untuk secara bersama-sama bahu-membahu meningkatkan usaha mereka, sehingga terjadi taraf hidup maupun kesejahteraan yang lama dicita-citakan.

Koperasi juga berperan dalam meningkatkan kemampuan para anggotanya dalam berorganisasi secara efektif, sehingga para anggotanya mempunyai kesempatan yang besar dalam mengartikulasikan kebutuhan dan tuntunan mereka.

Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari aktivitas para anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerja sama, memiliki kegairahan kerja dan menaati segala ketentuan dan garis

kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota. Dengan demikian usaha meningkatkan taraf hidup mereka tergantung dari aktivitas mereka sendiri.

Peran KUD Mina Jaya terdiri dari 3 hal yaitu:

a. Bantuan permodalan (pinjaman tanpa bunga bagi anggota)
b. Bantuan dana (meninggal, kecelakaan dan biaya sekolah anak)
c. Unit usaha, yang meliputi:
    1) Unit usaha pelelangan ikan
    2) Unit usaha Bahan Bakar Minyak (BBM)
    3) Unit Waserda
    4) Sewaan ruko
    5) Pengadaan alat tangkap nelayan
    6) Pengadaan unit air bersih

4. Nelayan

Sesungguhnya tidaklah mudah mendefinisikan nelayan dengan berbagai ketebatasannya yaitu apakah berdasarkan pekerjaan, tempat tinggal, maupun status pekerjaan. Menurut Ditjen Perikanan (2000, dalam Ulfa), nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nelayan adalah individu yang bekerja minimal satu jam pada sektor perikanan dan memiliki status pekerjaan baik mereka terikat dengan sistem upah atau tidak. Juru mudi nahkoda,

tukang selam, penebar jaring dan sejenisnya termasuk ke dalam kategori jenis pekerjaan seseorang (Mulyadi, 2005).

Menurut Hermanto (1986) terdapat tiga klasifikasi nelayan dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain, sedangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Menurut Ditjen Perikanan (2000, dalam Ulfah, 2011), nelayan berdasarkan kapasitas teknologi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Nelayan tradisional: nelayan yang belum menggunakan teknologi penangkapan ikan dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri,
b. Nelayan semi modern: nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan ikan (motor tempel atau kapal motor), dan
c. Nelayan komersial: nelayan yang berorientasi pada peningkatan keuntungan.

Menurut Nainggoan (2007), alat penangkapan ikan sangat banyak jenis dan ragamnya, namun pada prinsipnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Alat tangkap yang terbuat dari jaring,
b. Alat tangkap yang terdiri atas tali dan pancing, dan
c. Alat tangkap yang terbuat dari bahan lainnya.

Menurut BPS Provinsi Lampung (2009), kegiatan penangkapan ikan di laut dapat diklasifikasikan menurut jenis armada, yaitu:

a. Perahu tanpa motor
    1. Jukung: sampan atau perahu dengan bentuk yang sederhana
    2. Perahu papan
        a) Kecil (panjangnya < 7 m)
        b) Sedang (panjangnya 7-10 m)
        c) Besar (panjangnya > 10 m)
b. Perahu motor tempel
c. Perahu motor
    1. < 5 GT
    2. 5-10 GT
    3. 10-20 GT
    4. 20-30 GT
    5. 20-50 GT
    6. 50-100 GT
    7. 100-200 GT
    8. 200 GT ke atas.

Nelayan pancing adalah nelayan yang menangkap ikannya dengan cara tradisional, yaitu pancingan. Nelayan ini pada umumnya berlatar belakang pada masyarakat yang kurang mampu, kehidupan sehari-hari mereka adalah dari hasil penangkapan (Bengen, D.G., 2001). Nelayan pancing umumnya menggunakan armada jenis jukung, jenis perahu papan, baik yang kecil maupun yang sedang dan juga perahu motor < 5 GT.

5. Agribisnis Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap menurut Direktorat Jenderal Perikanan (2003) adalah kegiatan dalam bidang penangkapan atau pengumpulan hewan atau tanaman air yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Sistem perikanan terdiri atas sub-sub sistem yang saling terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Istilah bisnis perikanan merupakan acuan dari kegiatan sistem agribisnis yang banyak diaplikasikan untuk kegiatan-kegiatan di sektor pertanian.

Definisi Agribisnis menurut Ditjen Perikanan (1994) adalah semua aktivitas di bidang perikanan yang mencakup konsep dan prinsip manajemen agribisnis dari segi penyelenggaraan sarana produksi, produksi hingga pemasaran produk yang dihasilkan. Menurut Ditjen Perikanan (1994), secara konseptual sistem agribisnis perikanan terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu:

1) Sub sistem penyediaan sarana dan prasarana produksi, teknologi dan pengembangan sumberdaya.
2) Sub sistem usaha perikanan (usaha penangkapan ikan).
3) Sub sistem pengolahan.
4) Sub sistem pemasaran.
5) Sub sistem prasarana (pelabuhan).
6) Sub sistem pembinaan (kelembagaan).

Menurut Ditjen Perikanan (1994), sub sistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi mencakup kegiatan perencanaan, pengelolaan ataupun pengadaan sarana produksi teknologi dan sumberdaya perikanan. Kebijaksanaan yang mengupayakan agar sarana produksi dapat tersedia dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan sesuai dengan daya beli pembudidaya ikan, disertai dengan pengembangan dan penerapan paket ilmu pengetahuan dan teknologi *continue* (berkembang terus menerus) merupakan kebijaksanaan utama yang menjadi ciri keberadaan sub sistem ini.

Sub sistem produksi atau usaha perikanan mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan dalam rangka peningkatan produksi primer perikanan. Ruang lingkup kegiatan sub sistem ini diantaranya perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi dan pola usaha perikanan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan.
Sub sistem pengolahan hasil perikanan tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat pembudidaya atau nelayan, tetapi mencakup keseluruhan kegiatan dimulai dari penanganan pasca panen produk perikanan sampai pada tingkat pengolahan lanjut selama bentuk, susunan dan cita rasa komoditas tersebut belum berubah.

Agribisnis perikanan sering dihadapkan pada masalah resiko dan ketidakpastian usaha yang tinggi, yang biasanya hal ini bersifat eksternalitas yaitu di luar jangkauan nelayan. Resiko produksi misalnya selalu dihadapi oleh para nelayan karena produksi ikan di laut tunduk

pada milik umum (*property rights*), di mana biasanya mereka yang kuat selalu memenangkan perolehan ikan dari laut. Begitu pula halnya dengan resiko harga, selalu dihadapi para nelayan karena bentuk pasar yang sering dikuasai oleh para lembaga pemasaran tertentu. Akibatnya pembagian keuntungan antara nelayan adalah tidak imbang (Soekartawi, 1994).

Program peningkatan kesejahteraan nelayan pun mulai dibentuk pemerintah untuk membantu nelayan dalam meningkatkan pendapatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung terus berusaha melalui beberapa bantuan, antara lain:

1) Pengembangan alat tangkap nelayan hingga 4 mil dari bibir pantai laut Lampung.
2) Pembangunan kios yang diperuntukkan bagi para ibu nelayan di areal Teluk Betung sampai ke Pulau Pasaran.
3) Pemberian asuransi kepada nelayan pada musim paceklik.
4) Program seribu unit kapal yaitu pemberian bantuan kapal kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan.

6. Pendapatan

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dengan seluruh biaya. Jadi:

$$Pd = TR - TC$$

Di mana:
Pd = Pendapatan nelayan
TR = Total penerimaan
TC = Total biaya (Soekartawi, 1986).

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi dengan harga jual, sedangkan biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam suatu usahatani (Soekartawi, 1986). Tingkat produksi hasil tangkapan nelayan mempengaruhi total penerimaannya. Hal ini dapat dihitung dengan perkalian antara produksi dengan harga jual berbagai jenis ikan yang dihasilkan. Jadi:

$$TR = Y. Py$$

Di mana:
TR = Total Penerimaan
Y = Produksi hasil tangkapan nelayan
Py = Harga (Soekartawi, 1986).

Nelayan mengeluarkan biaya dalam melakukan usaha penangkapan ikan. Menurut Hernanto (1989) biaya produksi dapat dibedakan dalam beberapa bagian.

a. Berdasarkan jumlah output yang dihasilkan, terdiri dari:
    1) Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, misalnya sewa kapal dan penyusutan alat tangkap.
    2) Biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah produksi, misalnya pengeluaran untuk umpan.
b. Berdasarkan biaya yang langsung dikeluarkan dan diperhitungkan, terdiri dari:
    1) Biaya tunai adalah biaya yang langsung dibayar tunai. Contoh dari biaya tunai di antaranya adalah pembelian bahan bakar. Biaya tunai ini berguna untuk melihat pengalokasian modal yang dimiliki nelayan.

2) Biaya tidak tunai (diperhitungkan) adalah biaya penyusutan alat tangkap dan pemeliharaan armada.

Melalui penguasaan dan pengoperasian alat tangkap perikanan, sumberdaya yang terkandung di dalam laut dapat diambil dan dimanfaatkan. Kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan baik tradisional maupun komersial, bertujuan untuk dapat menghasilkan produksi yang nantinya akan digunakan oleh keluarganya atau dijual untuk dijadikan sumber pendapatan nelayan.

Pendapatan nelayan sangat tergantung pada hasil tangkapan dan pemasaran ikannya. Sedangkan penangkapan itu sendiri pada umumnya sangat dipengaruhi oleh macam perahu, alat tangkap, musim dan keadaan alam, khususnya angin dan bulan purnama serta potensi sumberdaya ikan yang ada. Pada musim hujan biasanya produksi ikan laut menurun, sedangkan pada musim kemarau relatif banyak karena curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi salinitas air laut. Demikian juga saat bulan purnama ikan sangat sedikit karena ikan menyebar pada permukaan perairan (Suyanto, 1996). Kondisi ini diperparah lagi dengan tak menentunya kondisi pemasaran ikan yang ada. Dari tahun ke tahun harga ikan mengalami naik turun (fluktuasi), apalagi bila musim panen ikan tiba biasanya harga ikan terus turun dan cenderung merugikan nelayan, khususnya nelayan tradisional.

Ada dua faktor yang menjadi penyebab munculnya kerentanan pada keluarga nelayan, yang pertama adalah musim. Seperti kehidupan petani,

kehidupan nelayan sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan cuaca dan alam. Di saat musim ikan kehidupan sehari-hari tidak ada masalah meskipun harga ikan sedikit turun, akan tetapi pendapatan nelayan tetap meningkat. Persoalannya adalah bila sudah saatnya memasuki musim barat atau musim ombak, saat tidak adanya aktivitas penangkapan di laut, gangguan cuaca, keterbatasan modal dan eksploitasi yang berlebihan serta salah pengelolaan daerah penangkapan menyebabkan nelayan tradisional makin masuk ke dalam kubangan kemiskinan. Kedua, adalah masalah harga dan daya tahan ikan hasil tangkapan yang tidak dapat bertahan lama, bila tidak segera dijual, maka akan busuk dan karena itu harganya pun menjadi sangat murah (Mukhlis, 1988).

Kehidupan masyarakat nelayan pada umumnya masih tergolong miskin. Kemiskinan nelayan ini apabila ditelusuri dapat dilihat dari berbagai karakteristik nelayan yang pada umumnya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah, lingkungan pemukiman yang tidak sehat, modal yang rendah, serta tingkat partisipasi yang minim dari kelembagaan formal (Pertiwi, 1994 dalam Mardiyanto, 1995).

Untuk memaksimalkan pendapatan, maka nelayan tidak hanya menggantungkan pendapatan dari perikanan saja. Oleh karena itu, menurut Diah Pitaloka (2006) diperlukan sumber pendapatan yang lain, yaitu:

a. Pendapatan perikanan selain pancing

Pendapatan ini berasal dari usaha lain nelayan di luar kegiatan memancing, seperti berdagang ikan dan pengrajin ikan asin. Pendapatan ini akan masuk ke dalam pendapatan perikanan, sekaligus bagi anggota KUD ditambah dengan pendapatan yang diperoleh dari manfaat ikut serta dalam kegiatan koperasi yaitu mendapatkan SHU.

b. Pendapatan sampingan (non perikanan)

Pendapatan sampingan dapat berasal dari luar perikanan (contoh: ojek, tukang cuci, dll).

Dari uraian pendapatan di atas maka pendapatan rumah tangga nelayan merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan dalam kegiatan perikanan, pendapatan kegiatan sampingan dan pendapatan dari anggota keluarga satu rumah yang lain yang juga bekerja, secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{Pt = Pd + Ps + Pa}$$

Di mana :

t = jumlah pendapatan rumah tangga nelayan pancing
d = jumlah pendapatan dari kegiatan perikanan
s = jumlah pendapatan dari kegiatan sampingan
a = jumlah pendapatan dari anggota keluarga

7. Penelitian Terdahulu

Permasalahan tentang peran koperasi cukup banyak diangkat oleh para peneliti terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu mengenai peran koperasi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penelitian mengenai peran koperasi

No.	Peneliti	Hasil Penelitian yang Relevan
1.	Sutisna (1998)	Adanya KUD Mina Bahari sangat bermanfaat bagi para nelayan anggota, terutama pada unit Tempat Pelelangan ikan (TPI)
2.	Pramudyani (2002)	Kurangnya manajemen yang baik mengakibatkan kemunduran pada kinerja keuangan KUD Mojosongo)
3.	Nurhasanah (2007)	Kurangnya partisipasi anggota dalam menjalankan kegiatan KUD Bina Mina Lampung Timur.
4.	Clair (2010)	Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan anggota yang diperoleh dari pelatihan yang diadakan oleh Koperasi Wanita "Cempaka" Lampung Tengah.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa banyak manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dalam menjadi anggota koperasi, namun semua itu tidak terlepas dari manajemen koperasi yang baik serta partisipasi anggota agar tercipta keberhasilan bagi koperasi, yang dapat dirasakan tidak hanya oleh anggota tetapi juga oleh masyarakat sekitar koperasi. Peningkatan pendapatan nelayan tidak hanya berdasarkan peran dari koperasi atau lembaga lain yang mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan anggotanya, tetapi juga dari beberapa faktor lainnya seperti pendidikan, jam kerja serta usaha perikanan selain perikanan tangkap. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu mengenai pendapatan nelayan di Indonesia yang tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Penelitian tentang pendapatan nelayan

No.	Peneliti	Hasil Penelitian yang Relevan
1.	Yudhistira (2001)	Faktor modal kerja, jam kerja, pendidikan dan jumlah tenaga kerja dapat mempengaruhi pendapatan nelayan di Kotamadya Sibolga.
2.	Sihombing (2003)	Semua jenis usaha perikanan (tangkap, pengolahan hasil, dan budidaya tawar) layak untuk dilanjutkan karena mengalami keuntungan.
3.	Yunawati (2008)	Pendapatan nelayan di Kecamatan Datuk Bandar lebih besar daripada pendapatan nelayan di Kecamatan Teluk Nibung. Pengalaman nelayan, ukuran kapal, frekuensi melaut berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan.
4.	Ulfah (2011)	Pendapatan nelayan tradisional di Kabupaten Lampung Selatan pada vegetasi mangrove rapat berbeda dengan pada vegetasi mangrove kurang rapat. Pendapatan di atas biaya tunai nelayan vegetasi mangrove rapat secara statistik lebih besar Rp 474.378 per tahun daripada pada mangrove kurang rapat. Pendapatan biaya total nelayan vegetasi mangrove rapat secara statistik lebih besar Rp 1.011.761 per tahun daripada pada mangrove kurang rapat.

B. Kerangka Pemikiran

Besarnya potensi sumber daya perikanan laut yang dimiliki oleh Indoneia, ternyata tidak dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Di mana masyarakat nelayan yang memiliki akses langsung

terhadap sumber daya tersebut justru hidup dalam lingkaran kemiskinan (Mulyadi, 2005). Lembaga ekonomi yang dianggap sesuai dalam upaya pencapaian peningkatan ekonomi yang merata di pedesaan adalah koperasi/ KUD.

Dalam kehidupan nelayan umumnya mereka tidak hanya menggantungkan hidupnya pada satu sumber pendapatan atau satu usaha kegiatan perikanan. Untuk mencapai pendapatan rumah tangga yang maksimal maka diperlukan beberapa sumber pendapatan, misalnya pendapatan dari kegiatan luar perikanan, serta pendapatan yang diperoleh dari keikutsertaan dalam KUD.

Nelayan tradisional pancing merupakan salah satu potret dari kehidupan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, kehidupannya hanya mengandalkan hasil tangkapan sehari-hari. Di sisi lain masyarakat ini juga masih rendah kualitas sumber daya manusianya, sehingga proses modernisasi agak sulit diterapkan pada mereka (Bengen, D.G., 2001).

Dengan menjadi anggota KUD diharapkan nelayan dapat mewujudkan satu efesiensi bagi nelayan anggota itu sendiri. Efesiensi ini dapat dilihat dengan indikator pendapatan yang diperoleh nelayan anggota tersebut, selain pendapatan perikanan dan non perikanan, juga pendapatan akibat dari menjadi anggota koperasi, yaitu dari pembagian SHU.

Peranan KUD dalam meningkatkan pendapatan nelayan dalam hal ini adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh KUD melalui program kerja ataupun unit usaha yang ada untuk mengusahakan meningkatkan pendapatan

anggotanya, dalam hal ini nelayan. Peranan ini dapat berupa usaha KUD dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada anggotanya seperti adanya unit simpan pinjam, pengadaan alat tangkap dan unit usaha pelelangan ikan bagi anggota KUD Mina Jaya. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut tujuan dari KUD Mina Jaya yaitu untuk membantu anggota dan masyarakat di dalam memasarkan hasil produksi mereka dan memberikan kredit yang diperlukan bagi anggota untuk meningkatkan kesejahterannya diharapkan dapat tercapai.

Anggota KUD Mina Jaya terbagi menjadi 2 jenis sesuai dengan keaktifannya, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah nelayan pancing yang terdaftar secara resmi dalam KUD, mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksaknakan KUD dan mendapatkan haknya sebagai sebagai anggota yaitu pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sedangkan anggota pasif adalah nelayan pancing yang hanya ikut dalam unit usaha tertentu yang dilaksanakan oleh KUD.

Paradigma peran KUD Mina Jaya dalam meningkatkan pendapatan nelayan pancing anggota di Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung disajikan pada Gambar 1 berikut ini.

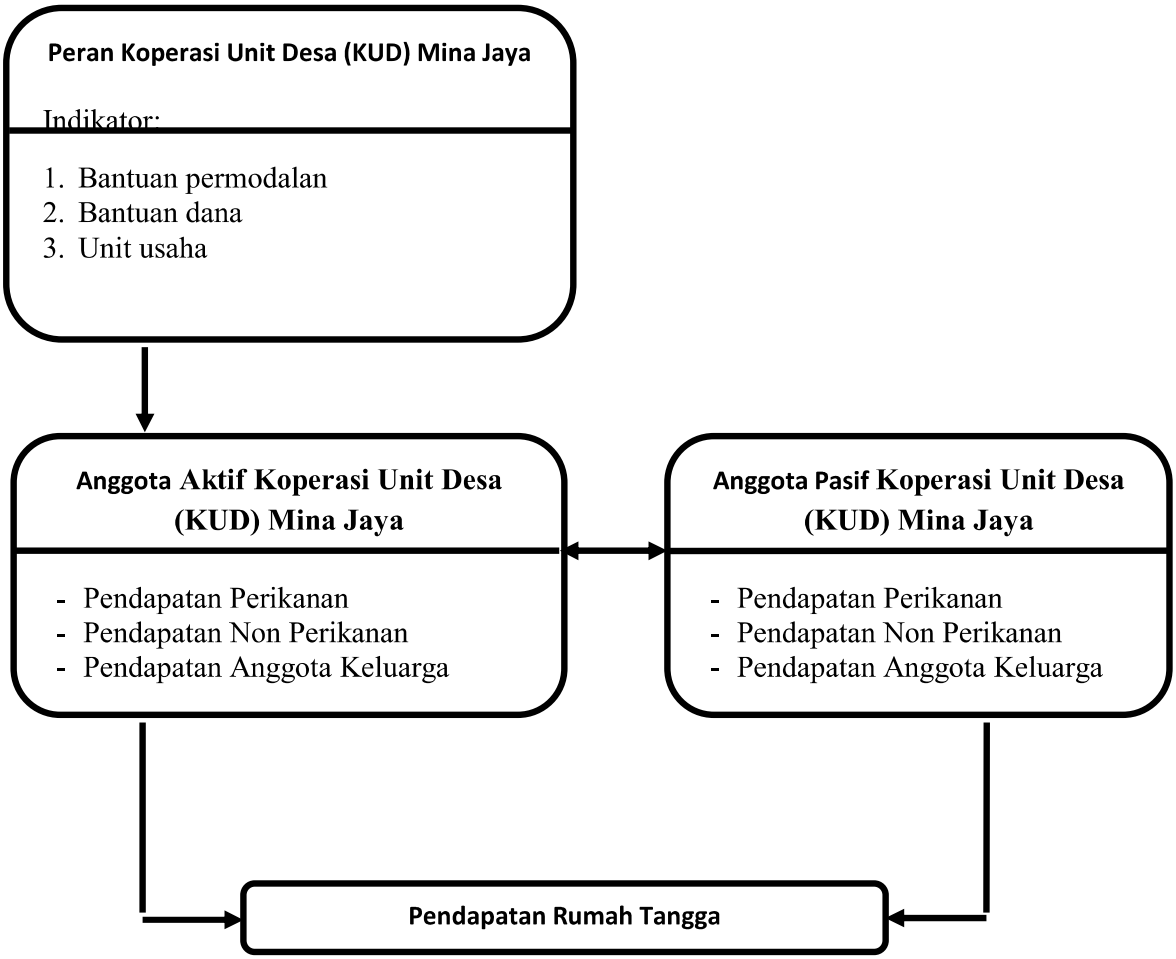

Gambar 1. Paradigma analisis pendapatan nelayan pancing anggota aktif dan anggota pasif KUD Mina Jaya di Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut "**Diduga ada perbedaan pendapatan rumah tangga antara nelayan pancing anggota aktif dan nelayan pancing anggota pasif KUD Mina Jaya".**